



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
BAGIAN ANGGARAN 005.01.1200.547678.000.KD

**SEMESTER II
TA 2019**



**BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Laporan Keuangan Semester II PTA Bandar Lampung
Bagian Anggaran 005.01.1200.547678
Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
Jl. Basuki Rahmat NO. 24 Teluk Betung Utara Bandar Lampung
Telp : (0721) 489813 – 489814 Fax (0721) 476054
Web.www.pta-bandarlampung.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Agama mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Bandar Lampung, 21 Januari 2020
Ketua Pengguna Anggaran,

Prs. Yusrizal M.H.
NIP. 196212081992031003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	28
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	35
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	45
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	54
F. Pengungkapan Penting Lainnya	58
VI. Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Bandar Lampung, 21 Januari 2020
Ketua Pengguna Anggaran,

Drs. Yusrizal M.H.
NIK. 196212081992031003

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 31 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 26,130,936.- atau mencapai 168 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 15,600,000.-.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 16,523,407,097.- atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 16,651,685,000.-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019. Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp 25,908,939,852.- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 4,485,230.-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 25,902,091,327.- ; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 2,363,295.-

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 20,874,281.- dan Rp 25,888,065,571.-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan

surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 26,547,936.- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 16,708,057,687.- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (7,738,478,722).- Surplus Kegiatan Non Operasional dan Surplus (Defisit) Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 8,680,009.- dan sebesar Rp (7,729,798,713).- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (7,729,798,713).-

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 27,040,087,147.- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp (7,729,798,713), dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 6,324,079,622.- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp 25,634,368,056.-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019		% thd Angg	2018
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	15,600,000	8,109,428	51.98	10,099,088
JUMLAH PENDAPATAN		15,600,000	8,109,428	51.98	10,099,088
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	12,310,649,000	6,671,184,464	54.19	6,788,732,948
Belanja Barang	B.4	2,837,385,000	745,498,101	26.27	645,119,439
Belanja Modal	B.5	556,500,000	61,801,200	11.11	662,300,000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-		-
JUMLAH BELANJA		15,704,534,000	7,478,483,765	47.62	8,096,152,387

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
NERACA
PER 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	70,000,000	26,406,000
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	10,940,520	11,588,170
Jumlah Aset Lancar		80,940,520	37,994,170
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	14,913,607,000	14,913,607,000
Peralatan dan Mesin	C.15	4,801,537,655	6,119,096,080
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.16	-	-
Gedung dan Bangunan	C.17	10,091,664,000	10,091,664,000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.18	1,294,917,000	1,294,917,000
Aset Tetap Lainnya	C.19	65,860,978	65,860,978
Konstruksi dalam pengerjaan	C.20	10,000,000	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.21	(5,557,153,733)	(5,420,628,507)
Jumlah Aset Tetap		25,620,432,900	27,064,516,551
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	25,000,000	25,000,000
Aset Lain-Lain	C.22	6,770,000	6,770,000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(28,775,364)	(28,144,023)
Jumlah Aset Lainnya		2,994,636	3,625,977
JUMLAH ASET		25,704,368,056	27,106,136,698
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	70,000,000	26,406,000
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	39,226,551
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	417,000
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		70,000,000	66,049,551
JUMLAH KEWAJIBAN		70,000,000	66,049,551
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	25,634,368,056	27,040,087,147
JUMLAH EKUITAS		25,634,368,056	27,040,087,147
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		25,704,368,056	27,106,136,698

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	8,526,428	10,099,038
JUMLAH PENDAPATAN		8,526,428	10,099,038
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	6,644,778,464	6,788,732,948
Beban Persediaan	D.3	50,560,000	34,583,521
Beban Barang dan Jasa	D.4	336,442,847	278,735,558
Beban Pemeliharaan	D.5	248,152,386	217,297,219
Beban Perjalanan	D.6	106,849,976	102,845,662
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	360,221,477	379,269,031
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		7,747,005,150	7,801,463,939
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(7,738,478,722)	(7,791,364,901)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		14,878,259	1,871,789
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(6,198,250)	(1,387,141)
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		8,680,009	484,648
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(7,729,798,713)	(7,790,880,253)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(7,729,798,713)	(7,790,880,253)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
EKUITAS AWAL	E.1	27,040,087,147	25,666,454,742
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(7,729,798,713)	(15,736,382,307)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		(691,460)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	E.3.1	-	-
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.2	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.3	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.4	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.6	-	(691,460)
KOREKSI LAIN-LAIN		-	-
JUMLAH		-	(691,460)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	6,324,079,622	17,110,706,172
EKUITAS AKHIR	E.5	25,634,368,056	27,040,087,147

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Dasar Hukum

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Pada Laporan Keuangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

9. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

Rencana Strategis

Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Peresmian operasional Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 1993

oleh Ketua Mahkamah Agung RI yang diwakili oleh hakim agung M. Yahya, S.H. bertempat di Pendopo Gubernur Provinsi Lampung. Selanjutnya tanggal tersebut dijadikan momentum peringatan HUT Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung setiap tahunnya.

Tahun 2015 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2015 – 2019 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tahun 2015 s.d 2019 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara. Sedangkan Misi Mahkamah Agung adalah :

- Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- Meningkatkan kinerja manajemen peradilan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
- Melaksanakan peradilan

Kemudian visi dan misi Mahkamah Agung tersebut

dijadikan acuan bagi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai visi dan misinya.

Adapun Visi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung adalah : Mewujudkan Peradilan Agama Yang Agung di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung . Sedangkan Misi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

- Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- Meningkatkan kinerja manajemen peradilan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
- Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- Mendorong terbentuknya pengadilan agama di kabupaten/kota pemekaran di Provinsi Lampung.
- Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Didasari oleh visi dan misi tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menetapkan tujuan strategis sebagai berikut :

- Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
- Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
- Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Bandar Lampung dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.
- Pelayanan peradilan agama yang cepat, sederhana

dan biaya ringan.

- Tenaga teknis yang berkualitas dan profesional.
- Manajemen Teknologi Informasi dalam pelayanan peradilan agama.
- Tersedianya sarana dan prasarana sebagai supporting unit seluruh kegiatan tupoksi PTA. Bandar Lampung.

Lalu dari tujuan strategis diatas ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

- Meningkatnya penyelesaian perkara
- Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
- Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
- Meningkatnya kualitas pengawasan
- Peningkatan kualitas SDM
- Peningkatan layanan perkantoran dan penyediaan , perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana.

Selain itu sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Banding yang di tunjuk Mahkamah Agung dalam mengelola, membina, mengawasi dan mengontrol / memonitoring pelaksanaan pelaporan sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang di lingkup wilayahnya memiliki visi dan misi tersendiri yang didasari oleh visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tersebut diatas.

Adapun Visi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam hal keuangan adalah Mewujudkan Laporan Keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan

serta dapat dipahami sehingga tidak diragukan lagi akan menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami sehingga dapat diyakini kewajarannya oleh auditor eksternal. Sedangkan Misi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam hal keuangan adalah sebagai berikut :

- Mewujudkan pelaksanaan & pengelolaan manajemen satuan kerja yang baik dan berkesinambungan.
- Meningkatkan kualitas efisiensi, efektifitas kinerja satuan kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
- Mewujudkan sumber daya manusia di bidang pelaporan yang profesional, bersih, berwibawa dan berakhlakul karimah di lingkungan PTA. Bandar Lampung.
- Mewujudkan pelaporan keuangan & pelaporan barang yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).

Kemudian Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai satuan kerja juga menetapkan tujuan strategis sebagai berikut :

- Terelenggaranya pelaporan di bidang keuangan dan BMN yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).
- Terwujudnya manajemen satuan kerja yang cepat, akurat dan bebas KKN.
- Meningkatnya pengelolaan pelaporan keuangan & pelaporan BMN yang efektif, efisien dan akuntabel.
- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang pelaporan keuangan & pelaporan BMN.

Lalu dari tujuan strategis diatas ditetapkan sasaran

strategis sebagai berikut :

- Memperjuangkan peningkatan anggaran DIPA yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan, yang terdiri dari :
 - Anggaran yang digunakan untuk kegiatan pengumpulan data ADK dan konsultasi bulanan dengan KPPN Bandar Lampung.
 - Anggaran yang digunakan untuk kegiatan rekonsiliasi data semesteran dengan KPKNL Bandar Lampung.
 - Anggaran yang digunakan untuk kegiatan pelatihan operator dalam rangka mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan / diselenggarakan oleh Korwil / KPPN / DJPB / KPKNL / DJKN mengenai peraturan-peraturan baru / aplikasi berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan.
 - Anggaran yang digunakan untuk pembuatan dan pencetakan laporan keuangan dan laporan barang semesteran dan tahunan.
 - Anggaran yang digunakan untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi bulanan dengan Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Kekayaan Negara.
 - Anggaran yang digunakan untuk pengelolaan alat tulis kantor (ATK) kegiatan korwil.
- Membuat perencanaan jadwal rutin satuan kerja sesuai dengan tupoksi yang terdiri dari :
 - Jadwal kegiatan pengumpulan data ADK dan konsultasi bulanan dengan KPPN Bandar Lampung, yaitu setiap awal bulan.
 - Jadwal kegiatan pengumpulan Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Wilayah dan satuan kerja baik LRA yang menggunakan format per mata anggaran kegiatan (MAK) per program

maupun format aplikasi SAK. Kegiatan ini dilakukan sebelum tanggal 15 setiap bulannya.

- Jadwal kegiatan rekonsiliasi data semesteran dengan KPKNL Bandar Lampung. Kegiatan ini dilakukan setiap awal bulan 7 (tujuh) tahun anggaran berjalan dan awal bulan 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
- Jadwal kegiatan rekonsiliasi data semesteran dengan Ditjen Kekayaan Negara Lampung. Kegiatan ini dilakukan setiap awal bulan 7 (tujuh) tahun anggaran berjalan dan awal bulan 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
- Jadwal kegiatan pelatihan operator-operator baru dan sosialisasi peraturan-peraturan / aplikasi berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan. Kegiatan pelatihan dan pembinaan operator-operator baru dilaksanakan setahun sekali setiap awal tahun.

Jadwal kegiatan penyusunan dan pencetakan laporan keuangan satuan kerja dan laporan barang satuan kerja semesteran dan tahunan. Kegiatan ini dilakukan 2 (dua) kali setiap akhir bulan 7 (tujuh) tahun anggaran berjalan dan akhir bulan 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

- Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pelaporan keuangan & pelaporan BMN.
 - Untuk pelatihan dan pembinaan, kegiatan difokuskan pada pelatihan dan pembinaan operator-operator baru akibat dari operator yang lama terkena proses mutasi. Ini adalah masalah klasik yang mau tidak mau pasti akan dihadapi. Karena itu setiap korwil seharusnya sudah

mempersiapkan kemungkinan seperti ini dengan mempersiapkan pelatihan dan pembinaan secara terjadwal setiap tahun sekali.

➤ Sedangkan untuk kegiatan sosialisasi di fokuskan kepada penyampaian peraturan-peraturan baru seperti peraturan penyampaian laporan pendapatan dan belanja secara akrual, pengisian format BKU dengan rumus excel, cara pembuatan/pengisian laporan realisasi anggaran per MAK per program dan LRA format Aplikasi SAIBA dan lain-lain. Lebih lanjut, selain sebagai Korwil di Lampung Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai satuan kerja memiliki visi dan misi tersendiri yang didasari oleh visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tersebut diatas. Adapun visi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai satuan kerja adalah mewujudkan laporan keuangan satuan kerja yang relevan, andal dapat dibandingkan serta dapat dipahami sehingga tidak diragukan lagi akan menghasilkan laporan keuangan wilayah yang relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami sehingga dapat diyakini kewajarannya oleh auditor eksternal.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung TA 2019 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Disamping itu, dalam penyusunannya

telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.

- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan

kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan

operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama

Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang.

Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan Rp
26,130,936.-*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 26,130,936.- atau mencapai 167,51 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp15,600,000,-. Pendapatan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan	15,600,000	15,555,896	99.72
Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL	-	-	-
Penerimaan kembali persekot / uang muka gaji	-	10,575,040	-
Jumlah	15,600,000	26,130,936	167.51

Realisasi Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan TA 2019 mengalami kenaikan 99,72 persen dibandingkan TA 2018, menurunnya penerimaan kembali belanja pegawai TAYL dan penerimaan kembali persekot/uang muka gaji.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	15,555,896	10,099,038	54.03
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	50	-100.00
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	10,575,040	0	0.00
Jumlah	26,130,936	10,099,088	158.75

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Negara Rp16,523,407,097 Realisasi Belanja instansi pada TA 2019 adalah sebesar Rp. 16.523,407,097.-atau 99% dari anggaran belanja sebesar Rp. 16,651,685,000.- Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2019

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	13,960,287,000	13,879,929,698	99.42
Belanja Barang	2,134,898,000	2,087,413,377	97.78
Belanja Modal	556,500,000	556,064,022	99.92
Total Belanja Kotor	16,651,685,000	16,523,407,097	99.23
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	16,651,685,000	16,523,407,097	99.23

Dibandingkan dengan TA 2018, Realisasi Belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar (4.66%) dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya dikarenakan menurunnya belanja modal.

Perbandingan Realisasi Belanja TA Desember 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	13,879,929,698	13,232,061,576	4.90
Belanja Barang	2,087,413,377	1,593,917,222	30.96
Belanja Modal	556,064,022	2,254,747,500	(75.34)
Jumlah	16,523,407,097	17,080,726,298	(3.26)

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp.
13,879,929,698,-

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 13,879,929,698.-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2019 mengalami penurunan sebesar (1)% persen dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain karena berkurangnya jumlah pegawai.

Perbandingan Belanja Pegawai TA Desember 2019 dan 2018

Belanja Gaji Pokok PNS	3,140,821,900	3,012,282,700	4.27
Belanja Pembulatan Gaji PNS	35,463	648,916	(94.54)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	232,652,300	241,655,730	(3.73)
Belanja Tunj. Anak PNS	50,181,864	52,610,508	(4.62)
Belanja Tunj. Struktural PNS	89,010,000	90,090,000	(1.20)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	8,183,480,000	7,759,000,000	5.47
Belanja Tunj. PPH PNS	1,588,474,191	1,506,730,322	5.43
Belanja Tunj. Beras PNS	115,437,480	128,183,400	(9.94)
Belanja Uang Makan PNS	436,996,500	385,815,000	13.27
Belanja Tunj. Umum PNS	42,840,000	55,045,000	(22.17)
Jumlah Belanja Kotor	13,879,929,698	13,232,061,576	4.90
Pengembalian Belanja Pegawai	1,645,969	185,000	-
Jumlah Belanja	13,881,575,667	13,232,246,576	4.91

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp.2,087,413,37

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.2,087,413,377.- dan Rp

7,-

1,593,917,222-. Realisasi Belanja Barang TA 2019 mengalami kenaikan(15.56)% dari Realisasi Belanja Barang TA 2018. Hal ini antara lain disebabkan karena menaiknyakegiatan-kegiatan kantor.

PerbandinganBelanjaBarang TA Desember2019dan2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	268,503,641	218,367,770	22.96
Belanja Barang Non Operasional	6,404,700	12,871,813	(50.24)
Belanja Jasa	74,355,057	61,310,538	21.28
Belanja Pemeliharaan	244,732,982	214,580,318	14.05
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	106,849,976	102,845,662	3.89
Belanja barang persediaan	44,651,745	35,143,337	27.06
Jumlah Belanja Kotor	745,498,101	645,119,438	15.56
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	745,498,101	645,119,438	15.56

B.5 Belanja Modal

*Belanja Modal
Rp61,801,200,-*

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp61,801,200.- dan Rp662,300,000.-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2019 mengalami penurunan sebesar (90.67)% dibandingkan TA 2018dikarenakan sedikitnyabelanja modal peralatan danmesin yang direncanakan PTA Bandar Lampung.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA Desember 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.801.200	662.300.000	(92,18)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.000.000	0	100,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	61.801.200	662.300.000	-90,67
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	61.801.200	662.300.000	-90,67

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 51.081.200.- mengalami penurunan sebesar (97.22) persen bila dibandingkan dengan realisasi TA2018 sebesar Rp. 662.300.000.-. Hal ini disebabkan oleh sedikitnya penambahan peralatan dan mesin sebagai fasilitas gedung PTA Bandar Lampung.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Alat Bantu	-	-	-
Alat Kantor	-	138.600.000	(100)
Alat Rumah Tangga	-	1.062.700.000	(100)
Laptop	51.801.200	-	100,00
Komputer Unit	-	428.820.000	(100)
Peralatan Komputer	-	236.159.500	
Jumlah Belanja Kotor	51.801.200	1.866.279.500	-97,22
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	51.801.200	1.866.279.500	-97,22

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 10.000.000.- dan Rp. 0,-. Terdapat kenaikan belanja modal gedung dan bangunan TA 2019 dibandingkan TA 2018 yang disebabkan karena adanya penambahan nilai gedung dan bangunan kantor berupa pengerasan jalanan di lingkungan kantor PTA Bandar Lampung.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2018	NAIK (TURUN) %
Penambahan nilai gedung & Bangunan Kantor	10.000.000	194.580.000	(95)
Penambahan nilai gedung & Bangunan Lainnya (Rumah Dinas)	-	193.888.000	(100)
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	10.000.000	388.468.000	(97)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp.0,-*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.26,406,000,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember
2019 dan 2018*

Keterangan	2019	2018
Uang Tunai	-	26.406.000
Kas lainnya atau setara kas	-	-
Jumlah	-	26.406.000

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp.0,-*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2019 dan 2018

Keterangan	2019	2018
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

C.3 Piutang PNB

Piutang PNB
Rp.0,-

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNB TA 2019 dan 2018

Uraian	2019	2018
Piutang PNB	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

C.4 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp.0,-

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp.0,-*

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

C.6 Belanja Dibayar di Muka

*Belanja Dibayar
di Muka Rp.0,-*

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2019 dan 2018

Jenis	2019	2018
Belanja pegawai dibayar dimuka	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

C.7 Persediaan

*Persediaan Rp.
4,485,230.-*

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.4,485,250.- dan Rp.

11.588.170.-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan 31 Desember 2019 dan 2018

Jenis	2019	2018
Barang Konsumsi	4.485.230	11.588.170
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Jumlah	4.485.230	11.588.170

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.8 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Tagihan
TP/TGR
Rp.0,-*

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

C.9 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

*Penyisihan
Piutang Tak*

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-

*Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp.0,-*

masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

C.10 Tanah

*Tanah
Rp14.913.607.000,-*

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp.14.913.607.000,- dan Rp.14.913.607.000,-. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas tanah untuk Tahun 2018, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	14,913,607,000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2019	14,913,607,000

C.11 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin
Rp.5.024.204.055,-*

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp.5.024.204.055.- dan Rp. 6.119.096.080,-

C.12 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan
Rp.10,541,626,02
2,-*

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2019 adalah Rp.10,541,626,022.- dan Rp. 10,091,664,000,- Mutasi gedung dan bangunan dapat dijelaskan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	10.091.664.000
Mutasi tambah:	
Pengembangan nilai aset	449.962.022
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2019	10.541.626.022
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(748.686.351)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	9.792.939.671

Pengembangan nilai Aset sebagaimana tercantum dalam BAST nomor W8-A/877/PL.01/VI/2019 tanggal 01 Juli 2019 untuk rehab gedung kantor.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.13 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Jalan,Jaringan
dan Irigasi
Rp.1,294,917,000
,-*

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 1,294,917,000,- dan Rp1.294.917.000,- Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas jalan, irigasi dan jaringan untuk Tahun 2019, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	1.294.917.000
Mutasi tambah:	-
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2019	1.294.917.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(1.056.820.506)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	238.096.494

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.14 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp.65.860.978,-*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp.65.860.978,- dan Rp.65.860.978,- Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap lainnya ini untuk Tahun 2019, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	65.860.978
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2019	65.860.978
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-10.000.000
Nilai Buku per 31 Desember 2019	55.860.978

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.15 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp.0,-*

Saldo konstruksi dalam pengerjaan 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

C.16 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
(Rp.5,938,123,728,-)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing (Rp.5,938,123,728,-) dan (Rp.5,420,628,507,-). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
TA 2019*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	5.024.204.055	4.122.616.871	901.587.184
2	Gedung dan Bangunan	10.541.626.022	748.686.351	9.792.939.671
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.294.917.000	1.056.820.506	238.096.494
4	Aset Tetap Lainnya	65.860.978	10.000.000	55.860.978
Akumulasi Penyusutan		16.926.608.055	5.938.123.728	10.988.484.327

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.17 Aset Tak Berwujud

*Aset Tak
Berwujud
Rp.25.000.000,-*

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp.25,000,000,- dan Rp.25,000,000,-

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	25.000.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2019	25.000.000
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2019	(23.125.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	1.875.000

C.18 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain
Rp6.770.000,-

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp.6.770.000,- dan Rp.6.770.000,- Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset lain-lain untuk Tahun 2019, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	6.770.000
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2019	6.770.000
Akumulasi Penyusutan	(6.281.705)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	488.295

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.19 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp.
29.406.705.-

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp. 29,406,705,- dan Rp.28,144,023,- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset

Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	25.000.000	-23.125.000	1.875.000
Jumlah	25.000.000	-23.125.000	1.875.000
Aset Lain-lain	6.770.000	-6.281.705	488.295
Jumlah	31.770.000	-29.406.705	2.363.295

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari KPPN **C.20 Uang Muka dari KPPN**

KPPN Rp.0.-

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 26,406,000,- (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.21 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada Pihak Ketiga
Rp.20,874,281,-*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp.20,874,281,- dan Rp. 39.226.551,- Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Utang kepada pihak ketiga pada PTA Bandar Lampung terdiri dari Belanja daya dan jasa, Kekurangan Gaji Pegawai bulan Desember 2019 serta belanja uang makan PNS bulan Desember 2019.

C.22 Pendapatan Diterima di Muka

<i>Pendapatan Diterima di Muka Rp.0,-</i>	Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.417,000,- Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.
---	---

C.23 Beban yang Masih Harus Dibayar

<i>Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0,-</i>	Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.
---	--

C.24 Ekuitas

<i>Ekuitas Rp.25,888,065,571,- -</i>	Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.25,888,065,571,- dan Rp.27,040,087,147,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
--	--

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP*

Rp.26,547,936,-

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. 26,547,936,- dan Rp. 18,113,076,- Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	2019	2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	15.972.896	18.113.076	-11,82
Penerimaan kembali persekot / uang muka gaji	10.575.040	0	100,00
Jumlah	26.547.936	18.113.076	46,57

D.2 Beban Pegawai

*Beban Pegawai
Rp.13,856,551,514,-*

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 13,856,551,514,- dan Rp. 13,258,467,576,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	2019	2018	NAIK (TURUN) %
Beban gaji pokok PNS	3.142.739.716	3.012.282.700	4,33
Beban pembulatan gaji PNS	38.932	648.937	-94,00
Beban tunj. Suami/istri PNS	232.652.300	241.655.730	-3,73
Beban Tunj. Anak PNS	50.181.864	52.610.508	-4,62
Beban Tunj. Struktural PNS	89.010.000	90.090.000	-1,20
Beban Tunj. Fungsional PNS	8.183.480.000	7.759.000.000	5,47
Beban Tunj. PPh PNS	1.588.474.191	1.506.730.322	5,43
Beban Tunj. Beras PNS	115.437.480	128.183.400	-9,94
Beban uang makan PNS	413.343.000	412.221.000	0,27
Beban tunjangan umum PNS	42.840.000	55.230.000	-22,43
Jumlah Bruto	13.858.197.483	13.258.652.597	4,52
Pengembalian	-1.645.969	-185.021	789,61
Jumlah	13.856.551.514	13.258.467.576	4,51

D.3 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp.83,708,910,-*

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 83,708,910,- dan Rp. 94,025,159,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	2019	2018	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	83.708.910	94.025.159	-10,97
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-	0	0,00
Beban Persediaan Lainnya	-	0	0,00
Jumlah	83.708.910	94.025.159	-10,97

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa
Rp.1,208,890,760
,-*

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 1,208,890,760,- dan Rp. 687,108,770,- Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	2019	2018	NAIK (TURUN) %
Beban keperluan perkantoran	497.678.771	436.298.295	14,07
Beban penambah daya tahan tubuh	0	0	0,00
Beban pengiriman surat dinas pos pusat	7.326.500	6.611.500	10,81
Beban honor operasional satuan kerja	56.400.000	56.400.000	0,00
Beban barang operasional lainnya	69.057.414	7.611.275	807,30
Beban bahan	8.341.700	29.934.813	(72,13)
Beban barang non operasional lainnya	0	0	0,00
Beban langganan listrik	154.158.552	145.309.088	6,09
Beban langganan telepon	9.643.823	3.283.799	193,68
Beban Sewa	406.284.000	0	100,00
Beban aset ekstrakomtabel peralatan dan mesin	0	1.660.000	0,00
Beban aset ekstrakomtabel gedung dan bangunan	0	0	0,00
Jumlah	1.208.890.760	687.108.770	75,94

D.5 Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp.470,566,268,-*

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 470,566,268,- dan Rp. 488,150,553,- Beban Pemeliharaan merupakan

beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	2019	2018	NAIK (TURUN) %
Beban pemeliharaan gedung dan bangunan	158.347.740	203.831.807	(22,31)
Beban pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya	32.580.865	32.927.139	(1,05)
Beban pemeliharaan peralatan dan mesin	272.210.859	244.172.907	11,48
Beban pemeliharaan jaringan	0	0	0,00
Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan	7.426.804	7.218.700	2,88
Jumlah	470.566.268	488.150.553	(3,60)

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp.346,517,422,-*

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 346,517,422,- dan Rp. 336,082,860,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	2019	2018	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	274.877.422	293.227.954	-6,20
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000	1.800.000	66,67
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	68.640.000	21.600.000	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	19.454.906	-100,00
Jumlah	346.517.422	336.082.860	3,10

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing

Rp.741,822,813,- sebesar Rp. 741,822,813,- dan Rp. 907,532,747,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
31 Desember 2019 dan 2018*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2019	2018	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	369.384.735	548.951.682	- 32,71
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	308.795.593	294.938.581	4,70
Beban Penyusutan Jalan dan jembatan	60.567.667	60.567.666	0,00
Beban penyusutan irigasi	822.136	822.136	-
Beban penyusutan jaringan	990.000	990.000	-
Beban Amortisasi Software	1.250.000	1.250.000	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak digunakan	12.682	12.682	-
Jumlah Penyusutan	741.822.813	907.532.747	- 18,26

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp 0,-*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
TA 2019 dan 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	2019	2018	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	0.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

D.9 Kegiatan Non Operasional

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp.10,141,129,-*

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp.
27.040.087.147,-

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 27.040.087.147,- dan Rp. 25.666.454.742,-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
(Rp.
16.671.368.622,-)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar (Rp. 16.671.368.622,-) dan (Rp. 15.736.382.307,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian
Nilai Aset
Rp0,-

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0,-

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

*Selisih
Revaluasi Aset
Tetap Rp0,-*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp0,-*

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0,- dan (Rp. 691.460.-).

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

*Koreksi Lain-
Lain Rp0,-*

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 , -dan Rp0,-

*Transaksi Antar
Entitas
Rp15.519.347.046,-*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 15.519.347.046- dan Rp. 17.110.706.172.- Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	16.523.407.097
Diterima dari Entitas Lain	(26.130.936)
Transfer Keluar	(1.146.294.715)
Transfer Masuk	168.365.600
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	15.519.347.046

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2019, DDEL sebesar (Rp26,130,936.-) sedangkan DKEL sebesar Rp16,523,407,097.-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp168,365,600,- dan transfer keluar sebesar Rp(1,146,294,715,-)

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah

Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp0,-

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp0,-

Ekuitas Akhir

Rp25,888,065,571.-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 25.888.065.571.- dan Rp. 27.040.087.147.-

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

**F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH
TANGGAL NERACA**

- Tidak terdapat kejadian – kejadian penting setelah tanggal neraca

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UAKPA / SATKER (NON BLU)
PERIODE TAHUNAN 2019

Kode BA dan Nama K/L: (005) Mahkamah Agung

Kode E1 dan Nama E1: (005) Badan Urusan Adminstrasi

Kode Wilayah dan Nama Wilayah: (1200) Lampung

Kode Satker dan Nama Satker: (547678) Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Tidak	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (v) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. LRA, Neraca, LO dan LPE <i>face</i>	v		Ada
2. Catatan atas Laporan Keuangan	v		Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akrua	v		Ada
2. Neraca Percobaan Kas	v		Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	v		Ada
<i>UAPPA-W/UAPPA-E1/UAPA dapat menambahkan Laporan yang harus disampaikan/dilampirkan dalam LK UAKPA/Satker sesuai dengan kebutuhan UAPPA-W/UAPPA-E1/UAPA dalam penyajian dan pengungkapan LKKL.</i>			
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Apakah semua <i>face</i> laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2017 ?	v		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga seharusnya sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
PENGUNAAN APLIKASI			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah seluruh Aplikasi (Persediaan, SIMAK BMN dan SAIBA) telah menggunakan versi paling akhir ?	v		Ya
<i>Apabila tidak menggunakan aplikasi versi terakhir dimungkinkan terdapat perbedaan posting rule yang berdampak pada penyajian laporan keuangan.</i>			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Neraca <i>Balance</i>	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Pada Laporan Neraca <i>Face</i> : Apakah Total Aset sama dengan Total Kewajiban ditambah Total Ekuitas ? (<i>Aset = Kewajiban + Ekuitas</i>)	v		Ya
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak	Seharusnya
2. Apakah Nilai " <i>Surplus/(Defisit)-LO</i> " di LO = Nilai " <i>Surplus/ (Defisit) - LO</i> " di LPE	v		Sama
3. Apakah Saldo " <i>Ekuitas Akhir</i> " di LPE = " <i>Saldo Ekuitas</i> " di Neraca	v		Sama

NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? <i>Cek juga di e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Akun Non Ref"</i>		√	Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? <i>Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal", kecuali akun "Beban Penyisihan Piutang"</i>		√	Tidak
TELAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN			
AKUN ASET (1xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? <i>(Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)</i>		√	Tidak
2. Adakah akun "Belum Diregister" ? <i>Dalam LK Tahunan tidak boleh ada akun "Belum diregister"</i>		√	Tidak
Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
2. Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. <i>Adakah saldo 218211 (hibah langsung yang belum disahkan) pada awal tahun ? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)</i>		√	Ya/Tidak
2. Apakah Saldo Akun 218211 akhir tahun berkurang dibanding awal tahun?		√	Ya/Tidak
3. Jika berkurang, apakah ada pengesahan Hibah Langsung TAYL (MPHL-BJS TAYL) ?		N/A	Ya
<i>Akun 218211 hanya dapat berkurang jika ada pengesahan Hibah Langsung TAYL.</i>			
4. Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 ?		N/A	Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
2. Adakah akun 391121 (Ekuitas Transaksi Lainnya) Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI		√	Tidak
Transfer Masuk (TM) 313221 dan Transfer Keluar (TK) 313211			
1. Nilai selisih TK/TM (excel e-Rekon&LK) secara Absolut			0
<i>Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangi kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?</i>			
2. Nilai selisih TK/TM secara Neto (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			0

AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)			
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 41xxxx (Pendapatan Perpajakan) <i>kecuali BA.015.04</i> ?		√	Tidak
Akun Pendapatan Bukan Pajak (42xxxx)			
Ketepatan penggunaan Akun PNPB Baru (<i>Kepdirjen 211/PB/2018 BAS</i>)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 423xxx (<i>Akun 423xxx tidak boleh ada</i>)		√	Tidak
2. Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621		√	Tidak
3. Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx		√	Tidak
4. Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998		√	Tidak
Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain-lain/transfer TAYL		√	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun yang tidak normal keberadaannya? (<i>misalnya pendapatan SIM/STNK/Kejaksan terdapat pada Kementerian Kesehatan</i>)		√	Tidak
2. Adakah akun 425719 Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? (<i>seharusnya 425764 (Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro))</i>)		√	Tidak
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)			
1. Adakah akun 43xxxx (Pendapatan Hibah)		√	Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)			
1. Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)?	Ya	Tidak	Seharusnya
2. Jika ada, apakah benar? (<i>Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?</i>)		N/A	Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxxx)			
1. Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?		√	Tidak
Akun BLU yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan frasa "BLU"		√	Tidak
2. Adakah akun 424xxx (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3. Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)		√	Tidak
4. Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
Telaah Pendapatan (491511) dan Beban (593311) Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511	Rp		19.068.279
2. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311	Rp		8.927.150
3. Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311	Rp		10.141.129
4. Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?		√	Tidak
Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar.			

LAPORAN OPERASIONAL			
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)		√	Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah		√	Tidak
3. Adakah beban bunga		√	Tidak
4. Adakah beban subsidi		√	Tidak
5. Adakah beban hibah		√	Tidak
6. Adakah beban transfer		√	Tidak
7. Adakah beban lain-lain		√	Tidak
Pengecekan saldo Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya		√	Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang	√		Ya
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>			
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015	Ya	Tidak	Seharusnya
10. Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO	√		Ya
<i>Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.</i>			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah saldo Pos "penyesuaian Nilai Aset" ?		√	Tidak
2. Apakah Nilai "Selisih Revaluasi Aset Tetap" sama dengan Laporan Hasil IP (LHIP) dari DJKN?		N/A	Ya
3. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Sama
<i>Apabila perhitungan no.3 menghasilkan "tidak sama" berarti melakukan jurnal menggunakan akun 391111 (perbaiki)</i>			
Pengecekan akun koreksi	Ya	Tidak	Seharusnya
Cetak seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119			
1. Apakah telah dibuat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?	√		Ya
N E R A C A			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN (Kec. Kemlu)	√		Ya
2. Apakah ada akun "Belum Diregister" ?		√	Tidak
3. Dari kolom perbandingan antara Tahunan 2018 dengan Audited 2017, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi) tanpa penjelasan?		√	Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2017, Apakah demikian?	√		Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"			
Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sama dengan LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?	√		Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:	N/A		Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)	N/A		Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	N/A		Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:	N/A		Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	N/A		Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)	√		Ada
- Pendapatan Penyesuaian Persediaan (akun 491511 di Neraca Percobaan)	√		Ada/Tidak
- Beban Penyesuaian Persediaan (akun 593311 di Neraca Percobaan)	√		Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ada
Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II			
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?		N/A	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?		N/A	Ya
7. Adakah beban bansos?		N/A	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?		N/A	Ya
Pengecekan Jurnal Akrua	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x) ?	√		Ada/Tidak
- Adakah pendapatan sewa diterima Dimuka (akun 219211) pada Neraca ?	√		Ada/Tidak
9. Adakah realisasi Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas (522141) ?		√	Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca		√	Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?	√		Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca	√		Ada
KESESUAIAN DENGAN L-BMN			
Rekon Internal LKKL dengan L-BMN	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal?		√	Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Tahunan 2018 ?		√	Tidak

Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"			
Apakah menurut e-Rekon-lk terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?	√		Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?	√		Ya
LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")		√	Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?		√	Tidak
Pengecekan TDK			
1. Adakah TDK Belanja Netto		√	Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto		√	Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU		√	Tidak
6. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
7. Adakah TDK Kas Hibah		√	Tidak
e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo			
Pengecekan TDK Hibah dengan SPAN	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah TDK Hibah Langsung dengan SPAN? Data selain dilihat dari SPAN, juga dapat diperoleh dari Dit. APK, DJPB.		√	Tidak
PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA			
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.			
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing KL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opname Persediaan ?	√		Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?	√		Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan		√	Tidak
4. Apakah PNBPN telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)	√		Ya
5. Adakan PNBPN digunakan langsung?		√	Tidak
6. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?	√		Ya
7.			Ya
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN			
Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)	√		Sama
Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya

2.	Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?	N/A		
3.	Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?	N/A		
4.	Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?	N/A		Ya
5.	Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?	N/A		Ada
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>				
6.	Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?	N/A		Ya
7.	Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?	√		Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

- 1 Pada Neraca Percobaan AkruaI tidak terdapat saldo tidak normal
- 2 Pada Neraca tidak terdapat Persediaan Belum diregister
- 3 tidak Terdapat Realisasi tanpa pagu (pagu minus)

Mengetahui

 H. S. Izal, M.H.
 NIP. 196212081992031003

Bandar Lampung, 21 Januari 2020

Perelaah,

Budiyanto
 NIP. 19770426 201408 1 001